

KATA PENGANTAR

Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Adonara Tahun 2023, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam Menyusun Rencana Kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD. Renca OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Adonara merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan unruk mengarahkan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Adonara khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Adonara Tahun 2023 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Adonara pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/ saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Adonara di masa mendatang sangat kami harapkan.

Sagu, Juni 2023.

CAMAT ADONARA
SILVESTER SELI TOKAN, SP
Pembina / IV. a
NIP. 19741104 200212 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		ii
BAB. I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja	5
BAB. II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	
	2.2 Analisis Pelayanan Perangkat Daerah	
	2.3 Isu-isu penting Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	
BAB. III	TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH	9
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
	3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
	3.3 Program dan Kegiatan	9
BAB. IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	10
BAB. V	PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari *system top-down* (dari atas ke bawah) sekarang *bottom-up* (dari bawah ke atas). Untuk itu diperlukan tata Kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka Panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk Periode I (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rencana Pembangunan Daerah maka harus memperhatikan 9 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum : mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara : menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
3. Asas Kepentingan Umum : mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan : membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas : mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Asas Profesionalitas : mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas : setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Asas Efisiensi : memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan mudah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan;
9. Asas Efektivitas : mencapai penyelenggaraan pelayanan public yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan public sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Adonara berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/ kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pertama-tama pengelolaan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Seluruh dokumen pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan Penyusunan Rancangan RPJMD adalah rancangan Renstra OPD selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra OPD.

RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan RAPBD. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan APBD tahun berjalan.

Begitu pula Renja Kantor Kecamatan Adonara merupakan penjabaran dari Restra Kantor Kecamatan Adonara dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran OPD). Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan pemerintah Nomor 58/2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana kerja pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata kerja.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud : sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/ kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Tujuan : mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun

Dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utam dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

- 2.1.** Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan

**EVALUASI RENJA TRIWULAN I,II, III DAN IV TAHUN 2023
KANTOR CAMAT ADONARA**

No	Sasaran	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (Tahun berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)			
						I		II		III		IV							
						7		8		9		10							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10	12 = 11/5x100%	13 = 11/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		KECAMATAN ADONARA			7.012.011.924		1.419.537.104		226.489.044		35.759.900		16.345.975		29.473.748		1.427.820.090	20	13
A		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			6.073.826.648		1.316.345.954		217.889.044		18.622.900		5.626.000		1.240.625		1.342.000.992	18,32518	1,2
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemgkat Daerah			294.000.000		36.000.700		1.477.450		1.485.900		5.626.000		1.240.625		25.236.145	0,706990387	0,1855
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	53.000.000	2 Dok	12.000.200		722.450		575.000		5.626.000		2.906.525		9.829.975	0,81915	0,2895
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-RKPD	8 dok	65.000.000	2 Lap	8.000.000		-		66.000		3.176.000		3.643.795		6.885.795	0,86072	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan lktisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lktisar realisasi Kinerja SKPD	8 lap	88.000.000	6 Lap	8.000.500		755.000		844.900		352.100		2.008.375		3.960.375	0,49502	0,0450
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kinerja Perangkat Daerah	8 Lap	88.000.000	4 Lap	8.000.000		-		-		2.190.000		2.370.000		4.560.000	0,57000	
		Adminitrasi keuangan Perangkat daerah			4.038.666.580		1.100.086.428		182.166.594		246.324.746		189.580.464		431.348.608		1.049.420.412	1	0
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)	56 Org/Bln	3.834.500.560	14	1.058.086.628		180.066.594		241.985.746		182.590.964		415.250.758		1.019.904.062	0,96391	
		Peleksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasih Keuangan SKPD (dok)	16 Dok	103.200.000	4	30.000.000		2.100.000		4.339.000		6.527.000		12.479.900		25.439.900	0,94600	0,2465
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (lap)	48 Lap	100.966.000	12	11.999.800		-		-		462.500		3.613.950		4.076.450	0,33871	0,0404
		Adminitrasi Barang Milik Daerh pada Perangkat daerah			42.800.000		5.000.000		-		-		551.500		3.311.910		3.363.410	1	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		21.000.000		-		-		-		-		-		-		

		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (lap)	4 Lap	21.800.000	12	5.000.000	-	-	551.500	3.311.910	3.863.410	0,77268	
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			39.000.000		-	-	-					
		Monitoring, Evaluasi dan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Kinerja Pegawai (dok)		7.500.000									
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	12 org	22.000.000		-							
		Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan	12 org	9.500.000		-	-						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			648.758.795		89.249.976	19.330.000	11.257.500	13.223.000	93.941.512	137.752.012	12,5438	10,5979
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan (paket)	4 Paket	33.000.000	1	1.499.976	535.000	378.000		1584969	2.497.369	1,665339312	0
		Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4 paket	125.094.505	1	12.000.000	2.215.000	2.502.000	1.505.000	4218750	10.440.750	0,8700625	0,083462899
		Penyedia Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	31.000.000	1	7.500.000	300.000	2.125.000	568.000	2431750	5.424.750	0,7233	0,174891935
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat dan bahan logistik kantor	4 paket	26.000.000	1	5.000.000	1.500.000	1.000.000	2.500.000	10000000	15.000.000	3	3
		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan Penggandaan (lembar)	4 paket	68.228.743	1	20.000.000	750.000	1.397.500	850.000	2653180	5.650.680	0	0,082819641
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang disediakan (dok)	4 Dok	4.080.000		1.250.000	-	-	-	-	-	-	0
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman Rapat dan Tamu yang disediakan (dos/DK)	4 Lap	97.355.547	12	12.000.000	3.750.000	1.000.000	1.000.000	11.250.000	17.000.000	1,4167	2,4799
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	42 Lap	256.000.000	12	30.000.000	10.280.000	2.855.000	6.800.000	61.902.963	81.737.863	2,7246	2,4799

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			287.457.374		23.999.975		-	1.850.000	1.589.975	-	17.579.920	-	21.019.895	0,8758	0,4101
		Peningkatan efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Desa yang difasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan desa (kali)	48 Lap	287.457.374	12 Lap	23.999.975		-	1.850.000	1.589.975	-	17.579.920	-	21.019.895	0,8758	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
		Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			51.172.996		-		-								
		Pembinaan dan Penanganan Covid-19 tingkat desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 ditingkat Desa dan Kelurahan	32 Dok	51.172.996		-		-								
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah			320.210.318		39.191.000	2.100.000		6.930.000	9.130.000	-			39.191.000	1,0000	0,1224
		pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dok)	48 Dok	320.210.318	12	39.191.000	2.100.000		6.930.000	9.130.000	-	21.031.000		39.191.000	1,0000	0,1224
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa			279.344.588		40.000.175	6.500.000		8.357.000		-	10.653.203		25.310.203	0,3060	0,1441
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang didistribusi dalam rangka penyusunan Desa dan Peraturan kepala Desa (Dok)	8 Dok	74.000.000		-										
		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan desa (desa)	32 Dok	73.498.965		20.000.000		-	400.000		-	8.989.728		9.389.728		
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11 Dok	20.000.000		-		-								

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan; Kebijakan adalah suatu arah Tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Adonara.

Table 3.1.1 :

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kantor Kecamatan Adonara

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tahun awal (2022)	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke			
				2023	2024	2025	2
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Adonara	Persentase Kualitas Pelayanan Publik	92%	100%	100%	100%	10

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan Adonara Tahun 2023 dan Prakiraan maju Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
RKPD KABUPATEN FLORES TIMUR
KANTOR CAMAT ADONARA
TAHUN 2024

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SATUAN)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7-1	0-0	0-0	UNSUR KEWILAYAHAN				672.654.422				608.378.652			
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		472.684.600					393.130.743		
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%							
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100%							
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100%							
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%							
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%	65.000.000						
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dok	15.000.000						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	10.000.000						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja SKPD (Laporan)	6 Lap	20.000.000						
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	20.000.000						

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SATUAN)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Administrasi Barang milik daerah Pada Perangkat daerah			10.000.000						10.000.000
					Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12 lap	10.000.000						10.000.000
					Administrasi Kepegawalan Perangkat daerah			8.000.000						
					Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4 Org	8.000.000						
					Administrasi Umum Perangkat Daerah			131.168.000						144.580.743
					Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1 Paket	5.000.000						6.000.000
					Penyedia Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan(Paket)	1 Paket	25.000.000						25.000.000
					Penyedia Peralatan rumah tangga	jumlah peralatan Rumah tangga yang disediakan	1 Paket	4.000.000						6.000.000
					Penyedia Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	1 Paket	3.000.000						5.000.000
					Penyedia Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	11.168.000						18.560.743
					Penyedia Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Mahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	10 Dok	1.020.000						1.020.000
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	12 Lap	20.000.000						22.000.000
					Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD (Laporan)	12 Lap	60.000.000						61.000.000
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	2.000.000						2.000.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			127.646.600						108.300.000
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	60.000.000						80.000.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (Unit)	1 Unit	41.346.600						15.000.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	26.300.000						13.800.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SATUAN)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			107.000.000						107.000.000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1 Lap	1.000.000						1.000.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Lap	10.000.000						10.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Lap	96.000.000						96.000.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23.850.000						22.750.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	8 Unit	9.000.000						9.750.000
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	7.000.000						3.500.000
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	7.850.000						9.500.000
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			57.169.424						63.597.205
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			57.169.424						63.597.205
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lap	57.169.424						63.597.205
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			12.227.161						12.391.508
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			12.227.161						12.391.508
					Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	8 Dok	12.227.161						12.391.508
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			65.074.273						76.476.180
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			65.074.273						76.476.180
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dok	65.074.273						76.476.180
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			65.498.964						62.783.018
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			65.498.964						62.783.018
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dok	18.000.000						18.500.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SATUAN)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Dok	17.498.964			-			18.500.000
					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dok	30.000.000						25.733.016

Sagu, 26 Juni 2023.
CAMAT ADONARA


SILVESTER SELITOKAN, SP
Pembina / IV.a
NIP. 19741104 200212 1 003



BAB V

PENUTUP

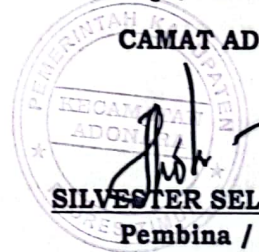
Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stake holders*) dalam menciptakan *Good Gevermance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Sedangkan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Adonara merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kantor Camat Adonara khususnya dana pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Demikian Rencana Kerja Kantor Kecamatan Adonara Tahun 2023 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/ kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Kantor Camat Adonara.

Sagu, Juni 2023

CAMAT ADONARA



SILVESTER SELI TOKAN, SP

Pembina / IV. a

NIP. 19741104 200212 1 003